

KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR PROVINSI DI SUMATERA

Yeniwati

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

This research is aimed to identify economic disparity of per capita GRDP at 2000 constant of 10 provinces in Sumatera over period 2005-2010. This study aims to obtain the empirical evidence on (1) influence investment to disparity of economy in Sumatera (2) influence agglomeration to disparity of economy in Sumatera and (3) influence natural resources to disparity of economy in Sumatera. It used secondary and establishment data BPS (Indonesia's Bureau Statistic). The methods of analysis are Williamson indeks, OLS (Ordinary Least Square) regression using panel data with method random effect

Result of research indicates that, out of 10 provinces in Sumatera, there are 5 provinces have the disparity index bigger than the average of Sumatera and 5 provinces have the disparity index smaller than the average of Sumatera. While, the result of investment has significant and negative influence to disparity of economy, agglomeration has significant and positive influence to disparity of economy, natural resources have significant and negative influence to disparity of economy

Keywords: *disparity of economy, investment, agglomeration and natural resources*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketimpangan pembangunan ekonomi dengan pendekatan PDRB perkapita atas harga konstan 2000 pada 10 propinsi yang ada di Sumatera selama tahun 2005-2010. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui (1) pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi di Sumatera (2) pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera dan (3) pengaruh sumber daya alam terhadap ketimpangan ekonomi di Sumatera. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan ekonomi digunakan indeks ketimpangan Williamson,

regresi OLS Sedangkan untuk mengetahui pengaruh sejumlah variabel terhadap ketimpangan pembangunan menggunakan data panel dengan metode *Random Effect*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 10 propinsi yang ada di Sumatera yang memiliki indeks ketimpangan yang lebih besar dari rata-rata Sumatera ada 5 propinsi. Sementara itu, hasil estimasi terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi dengan ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera. Variabel aglomerasi juga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera. Dilihat dari sumber daya alam juga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Sumatera

Kata kunci: ketimpangan ekonomi, investasi, aglomerasi dan sumber daya alam

PENDAHULUAN

Ketimpangan, pemerataan, dan infrastruktur sebenarnya telah dikenal cukup lama di Indonesia, misalnya melatar belakangi program padat karya berbagai pembangunan infrastruktur, berbagai program jaring pengaman sosial; pembangunan jaringan infrastruktur di pedesaan, seperti jalan, irigasi, listrik, telepon, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah.

Ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Berkembangnya propinsi-propinsi baru sejak tahun 2000an di Sumatera dan desentralisasi diduga akan mendorong ketimpangan antar daerah yang lebih lebar.

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang

maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2003).

PDRB per kapita merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu provinsi, dimana jika semakin besar PDRB perkapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan menghadapi beban yang terus meningkat karena banyak penduduk dari daerah lain terus berpindah ke daerah tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah perkotaan tersebut. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena sumberdaya yang potensial terus berpindah ke daerah maju sebagai pusat pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan daerah pusat pertumbuhan mengalami akumulasi pertumbuhan yang lebih tinggi karena didukung oleh sumberdaya potensial yang telah berpindah tersebut.

Tabel 1.
PDRB Perkapita Propinsi di Sumatera Tahun 2005-2010
(Milyar Rupiah)

No	Propinsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	NAD	9.00	8.87	8.52	7.94	7.38	7.36	8.18
2	Sumut	7.13	7.46	8.09	8.14	8.71	9.22	8.13
3	Sumbar	6.39	6.68	7.06	7.39	7.60	8.02	7.19
4	Riau	16.40	16.83	17.00	17.55	17.67	17.63	17.18
5	Jambi	4.75	4.98	5.21	5.49	5.74	5.65	5.30

6	Sumsel	7.35	7.57	7.99	8.15	8.35	8.56	7.99
7	Bengkulu	3.98	4.15	4.35	4.53	4.71	4.86	4.43
8	Lampung	4.13	4.28	4.49	4.66	4.82	5.04	4.57
9	Bangbel	8.34	8.42	8.55	8.82	9.02	8.89	8.67
10	Kepri	22.55	23.34	23.91	22.81	21.47	24.37	23.07
	Total	90.02	92.58	95.16	95.48	95.48	99.59	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Tabel 1. memperlihatkan PDRB perkapita di Sumatera pada tahun 2005-2010. Secara total PDRB perkapita di Sumatera mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun apabila dilihat per propinsinya hanya ada dua propinsi dari sepuluh propinsi yang ada di Sumatera yang rata-rata PDRB perkapitanya sangat jauh jaraknya dari propinsi lainnya yaitu propinsi Kepulauan Riau (Rp. 23.07 milyar) dan Propinsi Riau (Rp. 17.18 milyar).

Tingginya PDRB perkapita di propinsi Kepulauan Riau dan Riau disebabkan pendapatan dari sector migas yang lebih besar karena merupakan propinsi penghasil minyak di Sumatera. Selain itu banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang melakukan investasi di propinsi tersebut dengan membuka perusahaan-perusahaan mereka di wilayah tersebut.

Secara harfiah, pembangunan bertujuan untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan, namun dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga hasil pembangunan tersebut belum dinikmati oleh penduduk di wilayah Sumatera secara merata. Ketimpangan di Wilayah Sumatera selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek atau dimensi. Adanya ketimpangan pembangunan antar propinsi di Sumatera disebabkan berbagai kendala, baik dari segi investasi, maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki masing-masing propinsi yang tidak sama.

Penelitian ini dilakukan selain untuk mengetahui pengaruh investasi, aglomerasi dan sumber daya alam terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera.

KAJIAN TEORI

Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama yang memiliki barang modal (*capital stock*) akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya.

Myrdal dalam Jhingan (2003), membangun teori ketimpangan pembangunan menggunakan ide dampak balik (*backwash effect*) dan dampak sebar (*spread effect*). Myrdal mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi disuatu tempat yang dikarenakan sebab-sebab diluar tempat tersebut. Dalam istilah ini Myrdal memasukkan keseluruhan dampak yang timbul dari proses sirkuler antara faktor-faktor ekonomi maupun non ekonomi diantaranya migrasi, perpindahan modal (investasi), kekayaan alam dan konsentrasi kegiatan perdagangan. Dampak sebar menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Hal inilah menurut Myrdal yang menjadi penyebab utama ketimpangan pembangunan. Semakin kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan dan menyebabkan ketimpangan pembangunan di negara-negara terbelakang.

Menurut Kuznets dalam Kuncoro (2003) ketimpangan dalam pembagian pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal pembangunan, baru kemudian selama tahap-tahap lebih lanjut dari pembangunan berbalik menjadi lebih kecil, atau dengan kata lain bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal

mengalami kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut.

Lebih lanjut Kuznets mengasumsikan bahwa kelompok pendapatan tinggi memberikan kontribusi modal dan tabungan yang besar sementara modal dari kelompok lainnya sangat kecil. Dengan kondisi-kondisi lain yang sama, perbedaan dalam kemampuan menabung akan mempengaruhi konsentrasi peningkatan proporsi pemasukan dalam kelompok pendapatan tinggi. Proses ini akan menimbulkan dampak akumulatif, yang lebih jauh akan meningkatkan kemampuan dalam kelompok pendapatan tinggi, kemudian akan memperbesar kesenjangan pendapatan dalam suatu negara.

Sementara Freedman's (dalam Koncoro,2003) menyatakan bahwa atas dasar kenyataan pada sejarah proses pembangunan spasial menekankan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai kecenderungan untuk berkonsentrasi pada suatu daerah yang diawali oleh arus urbanisasi yang kemudian diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana.

Perroux (dalam Jhingan,2003) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak merata terjadi di berbagai daerah, tetapi mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan dan hal ini akan menentukan perkembangan ekonomi daerah lain yang lebih lambat perkembangan ekonominya.

Teori Pusat Pengembangan (*Growth Poles Theory*) merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruhan pelosok daerah (Sjafrizal, 1997). Teori ini dapat menggabungkan kebijakan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan secara terpadu.

Hirschman dalam Kuncoro (2003) perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap provinsi. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak

meningkatnya ekonomi di beberapa provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*trickle down effect*). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh Provinsi di Indonesia secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah.

Menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Dengan mempertimbangkan keunggulan-keunggulan data panel maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan data panel dalam upaya mengestimasi model yang ada. Periode yang digunakan adalah tahun 2005 sampai 2010 pada 10 propinsi yang terdapat di wilayah Sumatera Teknik yang dipakai dalam mengestimasi model adalah regresi kuadrat terkecil sederhana (*Ordinary Least Square, OLS*). Adapun spesifikasi model panel yang akan diestimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$V_{w_{it}} = \beta_0 + \beta_1 \log X_{1it} + \beta_2 X_{i2t} + \beta_3 X_{3it} + U_{it}$$

$$V_{w_{it}} = \text{Indeks Williamson propinsi-propinsi di Sumatera}$$

$\log X_{1it}$	=	Investasi
X_{2it}	=	Aglomerasi
X_{3it}	=	Sumber Daya Alam
U_{it}	=	<i>Error term</i>
$\beta_0 \beta_1 \beta_2 \beta_3$	=	Parameter

Dalam penelitian dipilih Indeks Williamson karena memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu dan melihat kecenderungan pola ketimpangan di Sumatera pada periode 2005-2010. Ketimpangan ekonomi diukur menggunakan indikator perkembangan PDRB perkapita tahunan sepuluh propinsi yang ada di Sumatera. Adapun cara menghitung indeks Williamson dapat dilakukan dengan cara (Sjafrizal,2008):

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \hat{Y}) \cdot f_i/n}}{\hat{Y}}$$

Dimana:

- V_w = Koefisien variasi Williamson (Indeks Williamson)
- Y_i = PDRB Perkapita masing-masing kabupaten/kota di masing-masing propinsi di wilayah Sumatera
- Y = PDRB Perkapita masing-masing propinsi di wilayah Sumatera.
- f = Jumlah Penduduk pada masing-masing kabupaten/kota di masing-masing propinsi di wilayah Sumatera
- n = Jumlah Penduduk pada masing-masing propinsi di wilayah Sumatera.

Sedangkan Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < V_w < 1$. Semakin mendekati 0 berarti ketimpangan semakin rendah dan semakin mendekati 1 ketimpangan semakin besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Pembangunan Propinsi- Propinsi di Wilayah Sumatera

Dalam penelitian ini ketimpangan ekonomi diukur dengan Indeks Williamson yang digunakan untuk melihat persentase ketidakmerataan dimulai dari 0 sampai 1. Dari Tabel 2 terlihat bahwa perkembangan ketimpangan ekonomi di propinsi-propinsi yang ada di Sumatera cenderung bervariasi satu sama lainnya. Dari 10 propinsi yang terdapat di Sumatera terdapat 5 propinsi yang memiliki indeks ketimpangan diatas rata-rata yaitu propinsi Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan propinsi Kepulauan Riau, sementara 5 propinsi lagi memiliki indeks ketimpangan di bawah rata-rata.yaitu propinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Propinsi Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat tingkat ketimpangan pembangunan propinsi-propinsi di Sumtaera relative lebih besar dibandingkan dengan Sumatera. Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan ketimpangan ekonomi antar propinsi di Sumatera dari tahun 2005-2010.

Jika dilihat dari rata-rata indeks Williamson di Sumatera selama tahun 2005-2010. Propinsi yang indeksnya tertinggi berada di Propinsi NAD (0.7486) dan diikuti oleh Riau (0.7075). Sementara indeks rata-rata terendah berada di Propinsi Bangka Belitung (0.3070). Ini berarti ketimpangan paling tinggi selama tahun 2005-2010 di Sumatera berada pada propinsi NAD dan paling paling rendah pada propinsi Bangka Belitung. Jika dilihat dari angka indeksnya terlihat jarak yang cukup jauh antara propinsi yang tingkat ketimpangannya paling tinggi dengan propinsi yang tingkat ketimpangannya terendah selama tahun penelitian yang berarti ketimpangan yang terjadi di Sumatera tidaklah merata dan terjadi gap yang cukup lebar antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin.

Tabel 2
Hasil Perhitungan Ideks Williamson Antar Propinsi
di Sumatera Tahun 2005-2010

No	Propinsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rerata
1	NAD	0.963	0.835	0.744	0.707	0.650	0.592	0.749

2	SUMUT	0.473	0.432	0.472	0.519	0.484	0.524	0.484
3	SUMBAR	0.495	0.361	0.354	0.357	0.351	0.380	0.383
4	RIAU	0.753	0.744	0.710	0.698	0.662	0.678	0.708
5	JAMBI	0.368	0.377	0.374	0.370	0.368	0.402	0.377
6	SUMSEL	0.597	0.583	0.579	0.557	0.542	0.535	0.566
7	BENGKULU	0.411	0.413	0.417	0.418	0.419	0.412	0.415
8	LAMPUNG	0.227	0.222	0.224	0.232	0.272	0.228	0.234
9	Bangbel	0.309	0.310	0.310	0.313	0.306	0.293	0.307
10	Kepri	0.641	0.652	0.688	0.574	0.527	0.583	0.611
	Sumatera	0.524	0.493	0.487	0.475	0.458	0.463	0.483

Sumber : Hasil Olahan Data,2012

Pengaruh Investasi, Aglomerasi dan Sumber Daya Alam Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Hasil estimasi pengaruh investasi, aglomerasi dan sumber daya alam terhadap ketimpangan ekonomi dengan pendekatan panel data dengan metode *random effect* didapat hasil sebagai berikut :

$$Vw = 1.314 - 0.085 \text{ Log}(X_1) + 0.089X_2 - 0.012X_3$$

$$R^2 = 0.82$$

$$F\text{-statistik} = 17.47$$

Dari persamaan di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.82 artinya 82% variasi variabel terikat ketimpangan ekonomi mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel-variabel bebasnya yang meliputi investasi, aglomerasi, dan sumber daya alam.

Adanya ketimpangan ekonomi antar propinsi diduga karena potensi sumber daya yang dimiliki antara propinsi satu dengan propinsi yang lainnya tidak merata dan tidak seragam, oleh karena itu pertumbuhannya pun berbeda. Untuk dapat tumbuh secara cepat, suatu daerah perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat.

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi dengan ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera. Pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera selama periode 2005-2010 adalah negatif dengan koefisien regresinya sebesar -0.085. Apabila jumlah investasi meningkat sebesar satu persen, maka akan menurunkan ketimpangan 0.085 persen. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah investasi di wilayah Sumatera maka akan terjadi penurunan ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera dengan asumsi *ceteris paribus*.

Terdapatnya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera ditentukan oleh jumlah investasi. Dengan

kata lain, naik turunnya investasi berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Myrdal dalam teorinya mengenai dampak balik yang diakibatkan oleh perpindahan modal dan motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lainnya akan terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidakmarataan pembangunan.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara aglomerasi (X_2) dengan ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera. Pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera selama periode 2005-2010 adalah positif dengan koefisien regresinya sebesar 0.089. Apabila aglomerasi meningkat sebesar satu persen, maka akan meningkatkan ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera sebesar 0.089 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hal ini disebabkan karena terkonsentrasinya kegiatan produksi yang cukup tinggi di sebagian kecil propinsi yang ada di Sumatera yaitu propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau yang mendorong pertumbuhan daerah cenderung lebih cepat. Sedangkan sebagian besar propinsi di Sumatera memiliki konsentrasi kegiatan produksi rendah akan mendorong pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, aglomerasi mendorong semakin tingginya ketimpangan wilayah di Sumatera.

Hal ini disebabkan propinsi Sumatera Utara termasuk kota tua yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, sehingga banyak sekali peluang bagi propinsi ini untuk dapat mengembangkan ekonominya. Sementara di propinsi Riau sumber daya alamnya sangat mendukung perekonomiannya sehingga menjadi factor penarik bagi investor dan tenaga kerja untuk datang ke daerah tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang bersifat padat karya yang membuka cabangnya di Riau yang dapat menyerap tenaga kerja.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sjafrizal (2008) bahwa aglomerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut maupun udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi ekonomi. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber daya alam (X_3) dengan ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera. Pengaruh sumber daya alam terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera selama periode 2005-2010 adalah negatif dengan koefisien regresinya sebesar -0.012. Apabila sumber daya alam meningkat sebesar satu persen, maka akan menurunkan ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera sebesar 0.012 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.

Terdapatnya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera ditentukan oleh sumber daya alam. Dengan kata lain, bertambah atau berkurangnya sumber daya alam berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera.

Seperti diketahui bahwa sumber daya alam yang terbesar di Sumatera terdapat di propinsi Riau dimana sumber daya alam baik migas maupun non migas sangat besar persentasenya terhadap PDRB propinsi ini. Dari sector migas propinsi Riau sangat terkenal dengan kekayaan minyak buminya dimana terdapat banyak kilang minyak yang memproduksi minyak mentah setiap harinya. Sementara itu dari sector non migas propinsi Riau juga memiliki ekspor non migas yang besar dan menjadi sector unggulan yaitu minyak sawit mentah (CPO) yang nilai ekspornya semakin meningkat dari tahun ketahun .Peningkatan ekspor sector migas dan non migas serta trend peningkatan harga komoditas ekspor unggulan dipasar internasional terutama CPO mengakibatkan nilai ekspor di Propinsi Riau paling besar di Sumtaera dan berdampak pada peningkatan PDRB propinsi ini.

Sumber daya alam yang berlimpah ini tidak terdapat di propinsi lain di Sumatera. Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah Sumatera yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sjafrizal (1997) yang menyatakan masalah pokok yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi di wilayah Indonesia bagian barat adalah faktor sumber daya alam, sosial budaya serta pengalokasian anggaran pembangunan.

PENUTUP

Ketimpangan ekonomi antar propinsi di Sumatera yang dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di 10 propinsi di Sumatera selama periode 2005-2010 yang terlihat dari Indeks Williamson terdapat lima propinsi yang memiliki indeks ketimpangan dibawah rata-rata propinsi dan lima propinsi yang memiliki indeks rata-rata di atas indeks rata-rata Sumatera.

Berdasarkan hasil estimasi investasi (X1), aglomerasi (X2) dan sumber daya alam (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Investasi mempunyai dampak yang negative terhadap ketimpangan ekonomi, artinya jika investasi naik maka ketimpangan ekonomi akan turun dengan. Sedangkan aglomerasi memberikan efek yang positif terhadap ketimpangan ekonomi, artinya jika aglomerasi meningkat maka ketimpangan ekonomi akan meningkat atau dengan kata lain terjadi penurunan dalam pemerataan hasil pembangunan ekonomi. Sementara itu, dilihat dari sumber daya alam yang memberikan pengaruh yang negative terhadap ketimpangan ekonomi, artinya jika sumber daya alam meningkat maka ketimpangan ekonomi akan menurun.

Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran dimana pemerintah daerah sebaiknya lebih banyak lagi mempromosikan potensi ekonominya kepada para investor. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi perlu

diamati secara cermat sektor ekonomi mana yang perlu dikembangkan untuk memperkecil *gap* aktivitas perekonomian antar wilayah.

Aglomerasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah Sumatera, hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja sehingga wilayah lain tetap terbelakang. Oleh karena itu pemerintah daerah harus merubah prioritas pembangunan tidak hanya pada daerah-daerah tertentu saja tetapi diperlukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah lain. Adanya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ini dapat memberikan dampak menyebar dan menghindari terpusatnya kegiatan ekonomi pada beberapa wilayah saja.

Untuk daerah-daerah yang memiliki potensi alam yang tinggi dapat lebih memaksimalkan penggunaan sumber daya alam tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sementara untuk daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam yang memadai dapat mengkonsentrasikan kegiatan ekonomi pada sector lain yang potensial di propinsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T dan A. Alisjahbana. 2002. "Regional Income Inequality in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 38 (2): 201-222.
- Ananta, Aris .1990. "*Ekonomi Sumber Daya Manusia*", Lembaga Demografi FE dan Pusat Antar Universitas Bidang Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ardani. Amirudin. 1992. *Analisis of Regional Growth and Disparity: The Impact Analisis of the Inpres Project on Indonesian Development*.Ph.D Thesis University of Pennsylvania USA, tidak dipublikasikan.
- Ardito Bhinadi. 2002. *Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Regional di Indonesia*. Tesis. Program Studi Magister Sains Universitas Gadjah Mada.
- Arsyad, Lincolin, 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan STIE YPKN. Yogyakarta.
- Armstrong, Harvey and Jim Taylor, (1993), *Regional Economics and Policy*, Second Edition, Harvester Wheat sheaf.
- Amstrong, H., J. Taylor. 2000. *Regional Economics and Policy*. Third Edition. Oxford: Blackwell Publishing
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2005-2010. *Statistik Indonesia* Berbagai Edisi : Padang.

- Barro, Robert J. 1999. *Inequality, Growth, And Investment*. NBER Working Paper Series. Working Paper 7038. *National Bureau of Economic Research*. Cambridge
- Bhinadi, Ardito. 2003. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Dengan Luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 39 – 48 Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional *Veteran* Yogyakarta
- Bonet. Jaime. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities : Evidence from The Colombian Experience. *Original Paper*. *Ann Reg Sci* 40:661-676.
- Diana, Wijayanti. 2004. Analisis Kesenjangan Pembangunan Regional : Indonesia, 1992-2001. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Vol. 9, No. 2, Hal: 129-142
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1985. *Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Cetakan Pertama. PT. Sinar Agape Press. Jakarta
- Esmara, Hendra. 1975. Regional Income Disparities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 11 (1): 41-57.
- Etharina. Disparitas Pendapatan Antar daerah di Indonesia *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Agustus 2005, I(1), hal.59-74.
- Gujarati, Damodar dan Porter, Dawn. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Buku 2 edisi 5. Salemba Empat. Jakarta

Glasson, John, 1990, *Pengantar Perencanaan Regional*, diterjemahkan Paul Sitohang, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Hartono, Budiantoro.2008. Tesis: *Analisa Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. Tidak dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Irwan dan Suparmoko. 1988. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : Liberty

Iskandar, I. 1993. Tesis: *Transformasi Perekonomian Sumatera Barat: Suatu Analisis Struktural (1969-1990)*. Tidak dipublikasikan, KPK-IPB – Universitas Andalas

Jhingan, ML. 2003. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kuncoro, M. 2001. *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi)*. Edisi Pertama, UPP AMP. Yogyakarta.

_____.2002. Analisis Spasial dan Regional: *Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

_____. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Ketiga*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

_____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi.Perencanaan. Strategi. dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta

- Liew, Venus Khim-Sen dan Kian-Ping Lim. 2005. Income Divergence? Evidence of Non-linearity in the East Asian Economies. *Economics Bulletin* 15 (1): 1-7.
- Mankiw, N Gregory. 2003. *Macroeconomics*. Worth Publisher. New York Panizza, Ugo. 2002. Income Inequality and Economic Growth: Evidence from American Data. *Journal of Economic Growth* 7, p. 25-41.
- Munawar Ismail. 1995. Teori Pertumbuhan dan Pemerataan. *Prima Tahun XXIV No.1*
- Perdana, Ari.A, 2005. Pendidikan, Pertumbuhan ekonomi, dan Pemerataan, www.google.co.id.
- Prasasti. Diah. 2006. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 30 Provinsi Di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparits Regional Dan Konvergensi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 21. No 4.
- Romer, David. 2006. *Advanced Macroeconomics*, Third Edition. McGraw-Hill Irwin. New York
- Sanjoyo. 2009. Panel Data dengan Eviews. ([www.blog forum diskusi ekonometrika.com](http://www.blog_forum_diskusi_ekonometrika.com)). November 2011.
- Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. LT3ES. Jakarta.
- Sjafrizal,1997. Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Jakarta: *Prisma* No 3 LP3S
- _____. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media

- Soediyono. 1992. *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Liberty, Yogyakarta
- Sofiagy, Yogi.2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. (Tesis). Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.
- Subri, Mulyadi. 2003. “*Ekonomi Sumber Daya Manusia*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suharto. Edi (2001). *How Informal Enterprises Cope with the Economic Crisis? The Case of Pedagang Kakilima in Bandung, Indonesia*, makalah yang disajikan pada New Zealand Asian Studies Society 14th International Conference, Canterbury University, Christchurch 28 November-1 December 2001.
- Sukirno, S. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Edisi Kedua. Kencana. Jakarta.
- _____. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi* edisi kedua. PT. Rajawali Grasindo Persada. Jakarta.
- Sutarno dan Mudrajad Kuncoro. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal *Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*
- Tambunan, Tulus 2001. *Perekonomian Indonesia. Teori dan Temuan Empiris*. Edisi Kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Tarigan. Robinson. 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.

Thee Kian Wie.1982. *Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta : Pustaka Jaya.

Todaro, Michael P, 2003, *Economic Development*, Eight Edition, Pearson Education Limited, Eidenburg Gate, Harlow, Essex, England Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Vibiz Regional Research. 2008. *Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Regional Kawasan Timur Indonesia*.
(<http://www.beritadaerah.com>).

Wibisono, Yusuf. Konvergensi di Indonesia: Beberapa Temuan Awal dan Implikasinya *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Januari 2003, Vol.51, hal.53-82.

Winarno, Wing Wahyu.2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wiyati, R.B. 2004. *Analisis Konvergensi Pembangunan antar Daerah: Studi Kasus Percepatan Pemerataan Pembangunan di Jawa Tengah 1993-2000* [Tesis]. Depok : Universitas Indonesia.

Ying. Long Cen. 2000. *China's Changing Regional Disparities during the Reform Periode*, Economic Geography.